

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPMP-MP DI DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

Donny Setyawan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
donnysetyawan00@gmail.com

Indah Prabawati, S. Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
prabwatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Negara Indonesia mempunyai permasalahan yang sangat kompleks salah satunya ialah kemiskinan, BPS menginformasikan jumlah masyarakat miskin per September 2016 mencapai 10,70% yang disebabkan oleh tingginya angka pengangguran. Pemerintah dalam menangani kemiskinan mengeluarkan Renstra nomor 96 tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga terciptanya kebijakan PNPMP-MP khususnya SPP yang menjadikan perempuan sebagai pelaku kebijakan dan sasaran. SPP adalah program yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan berbasis perkreditan rakyat, namun masyarakat desa kurang paham betul dengan tujuan diadakannya program SPP dan menggunakan dana program untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan evaluasi simpan pinjam perempuan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri dari staff BUMADES Bersama Mandiri Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, staff Pemerintah Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dan kelompok sasaran peminjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPMP-MP. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Evaluasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPMP-MP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan metode CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1971) yaitu, 1) konteks (*context*), tujuan program SPP PNPMP-MP menurut PTO PNPMP-MP, SPP adalah program kegiatan yang berbasis perkreditan rakyat ialah mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan social dasar, dan memeperkuat kelembagaan kaum perempuan serta mendorong pengurangan jumlah RTM. 2) Masukan (*input*), Pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk didanai oleh dana BLM yang bersumber dari APBD dan APBN. Implementor memiliki strategi untuk mendorong keberhasilan program dengan memberikan pendampingan serta pelatihan-pelatihan. 3) Proses (*procces*), Pelaksanaan program SPP PNPMP-MP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berjalan lancar, dibuktikan dengan terpenuhinya target UPK Bumades namun dari sudut pandang tujuan program pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh bisa dikatakan belum berhasil karena angka rumah tangga miskin di Desa Sumberkepuh tidak ada penurunan yang signifikan. 4) Produk (*product*), produk dari pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah terciptanya kelembagaan kaum perempuan serta terdapatnya Dansos untuk RTM dan penyandang disabilitas, tetapi tujuan program dalam pengentasan kemiskinan belum berhasil. Jadi dapat disimpulkan dalam pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih terdapat kendala, maka saran peneliti adalah, 1) penyeleksian yang ketat kepada calon peminjam, 2) menjalin kemitraan dengan dinas-dinas yang berhubungan dengan usaha dan potensi yang ada di desa-desa 3) penambahan pegawai BUMADES bersama Mandiri yang diharapkan mampu memaksimalkan kinerja BUMADES.

Kata kunci : Evaluasi, SPP, Pemberdayaan, Kemiskinan.

Abstract

Indonesian has quite complex problem, one of them is poverty. BPS informs society poor at September 2016 up to 10,70%, its caused high rate of jobless. Government try to solve it and make a strategic planning No. 96, 2015 about acceration tackling of poverty. So it's created

PNPM-MP policy especially SPP and make women as wisdom. SPP purpose is program to empower society and based of society credit, but society less understanding about purpose of SPP program and use fund program to daily needy. Research that use is descriptive by kuantitatif metod. Subject of this research is contained staff of BUMADES Tanjunganom Regency subdistric Nganjuk, and group who borrow of fund SPP program. Analize data used is collecting data, Reduction and (Penyajian data) and conclution. Result evaluation off SPP program PNPM-MP at Sumberkepuh village, Tanjunganom regency subdistrict Nganjuk by using CIPP metod is growed by Stufflebeam is, 1) Context, purpose of SPP program PNPM-MP according to PTO PNPM-MP, SPP is activity program that based of society credit to grow a potention society credit at village, case to acces, micro business to fulfill based socialfounding and make strong of women organization and to support decreasing RTM. 2) Input, SPP program at Sumberkepuh village, Tanjunganom Regency Subdistric of Nganjuk funded by BLM that sourced from APBN, APBD. Implementor has strategic to support of successfully this program by giving a colleague and training. 3) Process, SPP program PNPM-MP in Sumberkepuh Villeage walk clearly, its proved by reaching UPK BUMADES target but from purpose of program SPP in Sumberkepuh can't be said success yet, because poor house hold in Sumberkepuh village no decreasing that shows significant. 4) Product, product from SPP program in Sumberkepuh yillage has created institute for women and also available social fund for RTM and disabled people but the purpose of program decreasing poverty isn't success yet. So can be concluded in doing this SPP program still has a problem, so researcher give an idea, 1) selection tigetty to the caundidate of lender, 2) cooperate with institute that has same purpose 3) add a new employer of BUMADES Bersama Mandiri

Key : Evaluation, SPP, empowerment, poverty

PENDAHULUAN

Dewasa ini Negara Indonesia mempunyai masalah yang sangat komplek salah satunya ialah kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit di atasi karena kemiskinan yang ada di Indonesia bersumber dari banyak aspek. Menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa asset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi. Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan jumlah masyarakat miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia per September 2016 mencapai 10,70%, yang disebabkan oleh tingginya angka pengangguran dan kenaikan harga komoditif barang atau jasa, dan inflasi. (bps.go.id/bps-per-september-2016/)

Pemerintah pusat dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan yang ada, sudah banyak merumuskan strategi kebijakan untuk hasil yang efektif dan efisien. Presiden telah mengeluarkan Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Target penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10%. Pada akhir tahun 2019. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Menyempurnakan program perlindungan sosial
2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
3. Pemberdayaan masyarakat, dan
4. Pembangunan yang inklusif

(<http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/>)

Pemerintah pusat mencoba menyempurnakan kebijakan yang mampu dalam mengatasi kemiskinan, salah satunya ialah "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)". Program ini ialah lanjutan dari program pemberdayaan kecamatan (PPK), karena PPK dinilai efektif dan efisien dalam menanggulangi kemiskinan. Pada dasarnya kedua program PPK dan PNPM-MP masyarakat teelibat langsung dalam perumusan atau perencanaan anggaran program sehingga dapat meningkatkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. (<http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=7066&catid=2&>)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007, yang berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri memiliki tujuan umum yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan, kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilasi sumber daya yang ada di lingkungannya., mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Mekanisme PNPM MP dirumuskan kembali dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskina., Mulai dari menetapkan peta jalan PNPM MP serta melibatkan semua kalangan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif masyarakat, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat sebagai subjek pengentas

kemiskinan bukan lagi objek kebijakan. Hal ini menjadikan beban pemerintah berkurang dan pemerintah mampu fokus akan tugasnya sendiri.

Program berbasis pemberdayaan masyarakat ini adalah program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp. 750 juta sampai Rp. 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. (PTO PNPM-MP hal. 13)

METODE

Dalam penelitian tentang evaluasi program simpan pinjam perempuan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi.

Menurut Moleong (2004:06) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini menggambarkan serta menjelaskan evaluasi program simpan pinjam perempuan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti untuk mengetahui evaluasi program simpan pinjam perempuan (SPP) yang ada di Desa Sumberkepuh serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Context (Konteks)*

Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan di laksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu, Stufflebeam menyatakan evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan.

Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan kondisi nyata dengan kondisi yang di harapkan. Dengan kata lain evaluasi konteks dapat di gambarkan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek tertentu yang akan berjalan atau yang sedang berjalan. Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara terarah dan demokratis.

Sebelum adanya program SPP di Desa Sumberkepuh, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dengan jumlah 2.227 orang, serta buruh tani dengan jumlah 4.701 orang dan yang tidak bekerja adalah 4.685 orang

dari jumlah penduduk 12.848 jiwa. Angka pengangguran dan buruh tani serabutan cukup relatif tinggi sehingga mengakibatkan angka kemiskinan di Desa Sumberkepuh tinggi yaitu mencapai 1089 KK. Kemiskinan merupakan faktor utama pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat pedesaan, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

Pemerintah dalam membuat rencana strategis yaitu pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai sektor utama kebijakan merupakan hal yang tepat karena pedesaan sebenarnya memiliki potensi dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Desa Sumberkepuh memiliki potensi pertanian yang sangat luas yaitu 743 Ha yang terbagi atas sawah integrasi 551 Ha, ladang 156 Ha, dan pekarang 36 Ha.

SPP dalam pelaksanaannya memerlukan kebutuhan yang harus terpenuhi untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan oleh pemerintah, tujuan SPP menurut PTO PNPM-MP ialah mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kaum perempuan serta mendorong pengurangan jumlah rumah tangga miskin (RTM) sehingga terciptanya lapangan pekerjaan pedesaan.

Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sumberkepuh memiliki potensi pertanian yang luas sehingga dalam pencapaian tujuan program SPP di Desa Sumberkepuh akan lebih mudah. Tidak hanya potensi persawahan atau pertanian, Desa Sumberkepuh juga memiliki potensi SDM usia produktif sekitar 5226 orang. Potensi tersebut sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan program SPP karena program SPP adalah program pemberdayaan masyarakat yang berbasis perkreditan rakyat sehingga masyarakat benar-benar terlibat penuh dalam pengentasan kemiskinan dan pengadaan lapangan pekerjaan pedesaan.

Pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh untuk mencapai tujuan memerlukan beberapa kebutuhan, kebutuhan masyarakat sasaran SPP di pantau dalam kurun waktu satu tahun masa berjalannya program dan dilakukan evaluasi tiga bulan sekali. Perencanaan kebutuhan dilaksanakan satu tahun sekali pada awal tahun dalam Musrenbangdes, karena implementor kebijakan sadar bahwa kebutuhan kebijakan bersifat fleksibel atau berubah ubah mengikuti perubahan lingkungan kebijakan.

Program SPP PNPM-MP diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran pemberdayaan melalui Program Pengembangan Kecamatan. Pada praktiknya SPP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tak lepas dari masalah. Masalah program SPP terletak bukan hanya pada pelaksanaan program namun pada tahap perencanaan program juga terdapat masalah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan tujuan program SPP. Masyarakat cenderung berpikiran bahwa

tujuan program adalah urusan pemerintah bukan urusan masyarakat umum.

2. *Input (Masukan)*

Evaluasi masukan atau evaluasi input menyediakan data untuk menentukan bagaimana penggunaan sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan program. Hal ini berkaitan dengan relevansi, kepraktisan, pendanaan, efektifitas yang dikehendaki, dan alternatif-alternatif yang dianggap unggul. Evaluasi ini mencakup kegiatan identifikasi dan penilaian kemampuan sistem yang digunakan dalam program, strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan program dan rancangan implementasi yang dipilih.

Program SPP di Desa Sumberkepuh, di danai dari dana BLM, dana BLM sendiri berasal dari APBN, APBD serta kerjasama pelaksana kegiatan dengan pihak luar atau CSR. Pendanaan APBD di dasari oleh Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 tahun 2011 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah kepada kelompok masyarakat untuk program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Kabupaten Nganjuk.

Dana BLM perkecamatan berbeda-beda tergantung dengan jumlah penduduk di setiap kecamatan. Dana BLM berkisar sekitar 750 juta sampai 3 miliar perkecamatan, Kecamatan Tanjunganom pada tahun 2016 mendapat dana BLM sekitar 400 juta dari dana hibah pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pemberian dana pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat berbeda dengan PTO PNPM-MP yang menyatakan sekurang-kurangnya sekitar 750 juta samapai 3 miliar, sehingga dana SPP yang dapat digunakan hanya 100 juta. UPK BUMADES bersama Mandiri Kecamatan Tanjunganom menggunakan dana BLM sekitar 50% dari dana BLM hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang mengajukan pinjaman SPP. Biaya UPK dalam melaksanakan program SPP juga berasal dari dana BLM yaitu 2% dari dana BLM kecamatan, pendanaan operasional dibatasi dan diatur oleh pemerintah dimaksudkan untuk meminimalisir penggunaan anggaran supaya dana BLM benar-benar mampu membantu program mencapai tujuan.

Dalam pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk memiliki sasaran khusus yaitu kelompok perempuan yang memiliki usaha kecil menengah serta RTM (Rumah Tangga Miskin). Pemilihan sasaran tersebut didasari dari tujuan program SPP. Sasaran khusus SPP ialah Rumah Tangga Miskin (RTM), jumlah RTM di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom sekitar 1089 KK. Jumlah total perempuan di Desa Sumberkepuh yaitu sekitar 6356 jiwa. Hal inilah yang menjadikan peminjam di Desa Sumberkepuh banyak yaitu mencapai 15 kelompok peminjam dengan jumlah anggota 116 jiwa dan total biaya pinjaman adalah Rp. 246.000.000,-.

Sumber daya program SPP untuk mencapai tujuan program selain sumber dana ialah sumber daya manusia atau implementor kebijakan. Pelaksanaan SPP di Desa Sumberkepuh melibatkan semua kalangan masyarakat, yaitu masyarakat atau sasaran program, pemerintah desa, serta UPK (pelaksana program SPP). Program SPP

melibatkan semua golongan dikarenakan program ini bersifat pemberdayaan masyarakat dengan sistem perkreditan rakyat sehingga masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dimaksudkan untuk kemandirian dan keberlangsungan serta masyarakat lebih mengetahui akan kebutuhannya masing-masing. UPK dalam pengontrolan keberlangsungan program SPP memberikan pendampingan di setiap desa yang telah disediakan oleh pihak pemerintah desa. Pendamping di pilih berasal dari desa masing-masing dikarenakan pendamping lebih mengerti karakteristik masyarakat setempat dan mengetahui permasalahan yang ada di lingkungan desa sehingga pengontrolan mudah dilakukan, serta diharapkan terjadinya komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pihak UPK melalui pendamping desa.

Pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh juga di dukung oleh usaha masyarakat sendiri, masyarakat yang membuka usaha mikro menengah, seperti pedagang, peternak dan jasa sekitar 783 jiwa. Usaha masyarakat yang ada di Desa Sumberkepuh merupakan sasaran umum program SPP, hal ini dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan pedesaan dengan cara mengembangkan usaha dengan bantuan dana pinjaman SPP. Usaha masyarakat juga merupakan sumber daya program untuk mempercepat laju perekonomian masyarakat desa selain sektor pertanian.

Pelaksana program SPP juga mempunyai alternatif khusus untuk membantu masyarakat menggunakan dana pinjaman dari program SPP. Alternatif yang dibuat oleh implementor ialah sosialisasi program SPP di desa-desa baik melalui pendamping ataupun pihak UPK dan pemerintah desa, kedua ialah pemberian pelatihan usaha untuk pengembangan usaha yang telah dimiliki oleh masyarakat ataupun pendirian usaha oleh RTM dan pengangguran di Desa Sumberkepuh. Alternatif tersebut dinilai kurang efektif oleh pemerintah desa dan pendamping dikarenakan pelatihan dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tidak digunakan seperti yang diharapkan, masyarakat datang kepelatihan hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai anggota peminjam bukan sebagai bentuk perwujudan pemberdayaan untuk kemandirian masyarakat.

3. *Proses (Proses)*

Evaluasi proses menyediakan umpan balik yang berkenaan dengan efisiensi pelaksanaan program. Evaluasi ini mendeteksi atau memprediksi kekurangan dalam rancangan prosedur kegiatan dan pelaksanaan program, serta menyediakan data untuk keputusan dalam implementasi program dan memelihara dokumentasi tentang prosedur yang dilakukan. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

Program SPP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk memiliki aturan-aturan yang tidak diperbolehkan dan syarat-syarat dalam pengajuan SPP. Pelaksanaan di Desa Sumberkepuh hal itu sedikit diabaikan oleh implementor dan terdapat kerenggangan dalam penegakan peraturan yang ada. Sebagai contoh kelonggaran penegakan aturan,

pengajuan simpan pinjam perempuan (SPP) hanya sekedar memberikan bukti KTP dan proposal yang telah disediakan oleh pendamping desa, padahal pada aturan PTO tertulis bahwa salah satu syarat pengajuan SPP adalah kelompok telah berpengalaman dalam pengelolaan dana simpan pinjam minimal 3 tahun. Kelonggaran tersebut digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk meminjam dana yang tidak digunakan untuk membuka usaha ataupun mengembangkan usaha.

Aturan program SPP di Desa Sumberkepuh dikontrol dengan baik oleh pihak pelaksana kebijakan yang bekerjasama dengan pemerintah desa dan Babinkamtibmas Desa Sumberkepuh. Kerjasama antar desa dan pihak yang terkait dilakukan setiap tahunnya oleh pihak UPK dengan mengadakan musyawarah antar desa (MAD) dan pertanggungjawaban. Kerjasama ini dilakukan untuk mengingatkan dan mensosialisasikan jenis usaha yang dilarang didanai oleh masyarakat peminjam dana SPP. MAD dilakukan selain pemberian informasi mengenai larangan usaha yang dilarang didanai oleh SPP juga untuk membahas permasalahan dan kebutuhan di tiap desa.

Program SPP juga memiliki sanksi kepada peminjam dana SPP, sanksi diberikan kepada masyarakat yang ketahuan dalam pelanggaran penggunaan dana SPP. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat bertahap dari peringatan, pembokliran peminjaman dan pemberian sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi selain pelanggaran peraturan ada juga sanksi bagi masyarakat yang tidak bertanggungjawab dalam pengembalian pinjaman SPP yaitu pencabutan keanggotaan sehingga masyarakat yang mendapat sanksi tidak dapat meminjam dana SPP sampai dinilai layak oleh pihak UPK.

Pelaksanaan program SPP PNPM-MP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berjalan lancar, dibuktikan dengan terpenuhinya target UPK Bumades yang di rancang setiap tahunnya selalu mencapai target. Dilihat dari sudut pandang tujuan program, pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh bisa dikatakan belum berhasil karena dari 15 kelompok jumlah peminjam yang berhasil mengembangkan usaha hanya ada 2 kelompok dan angka rumah tangga miskin di Desa Sumberkepuh tidak ada penurunan yang signifikan.

Belum berhasilnya program SPP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk disebabkan oleh penyimpangan penggunaan dana SPP untuk konsumtif sehari-hari hal ini menyebabkan penghambatan pencapaian tujuan. Faktor penghambat dari program SPP PNPM-MP dari segi pelaksana program yaitu kurangnya personil Bumades yang ada tidak sebanding dengan sasaran program. Personil yang ada sekitar 10 orang sedangkan jumlah peminjam dana ada 2190 orang dengan jumlah kelompok 261. Sedangkan pendukung program SPP ialah program SPP berbasis perkreditan rakyat sehingga dana bergulir terus menerus dan semakin bertambah karena setiap orang diberikan bunga 0,01% dari jumlah pinjaman.

4. Product (Produk)

Evaluasi produk mengukur dan menginterpretasikan pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program. Evaluasi ini berkaitan dengan pengaruh utama, biaya dan keunggulan program. Evaluasi produk berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan baik jangka pendek atau jangka panjang.

Tujuan program SPP di Desa Sumberkepuh juga sama seperti yang ada dalam PTO PNPM-MP, yaitu mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kaum perempuan dalam partisipasi pembangunan ekonomi di tingkat desa serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin (RTM) dan terciptanya lapangan pekerjaan pedesaan. Pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom terdapat beberapa masalah seperti yang telah dipaparkan diatas yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tujuan pemberdayaan masyarakat melalui program SPP, serta penggunaan dana SPP untuk konsumtif sehari-hari, sehingga tujuan program tidak tercapai dengan maksimal.

Hasil dari pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu terciptanya kelembagaan kaum perempuan seperti koperasi perempuan dan PKK, meskipun koperasi perempuan belum mempunyai program pasti dalam partisipasi pembangunan ekonomi. Produk dari SPP selain kelembagaan perempuan di Desa Sumberkepuh ialah pendanaan usaha masyarakat ibu-ibu rumah tangga dan membantu pengembangan usaha yang telah dimiliki.

Produk lain dari program SPP yang berjalan ialah pemberian dana sosial kepada keluarga tidak mampu yang mempunyai anak sekolah berupa faktor penunjang kebutuhan pendidikan dan pemberian dana sosial untuk penyandang disabilitas. Hal ini di dapatkan dari dana surplus pendapatan UPK, dengan jumlah dana maksimal 15% dari surplus pendapatan. Dari beberapa tujuan umum SPP yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat, tujuan yang baru dapat dicapai dari tahun 2008-2016 hanya tiga tujuan dari tuju tujuan. Tujuan yang terpenting dalam program SPP ialah pengurangan RTM dan terciptanya lapangan pekerjaan di Desa Sumberkepuh belum dapat terpenuhi dan angka RTM masih belum berkurang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk diketahui bahwa Program SPP PNPM-MP adalah program dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Program SPP PNPM-MP adalah program pemberdayaan masyarakat yang berbasis perkreditan rakyat, program ini

dibuat dalam rangka untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di tingkat pedesaan dan terciptanya lapangan pekerjaan melalui perempuan. Program Simpan Pinjam Perempuan juga upaya melembagakan perempuan untuk kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini dijabarkan menggunakan metode Evaluasi Kontek, Input, Proses dan Produk yang dikembangkan oleh Stufflebeam..

Dilihat dari metode evaluasi *context* (Konteks) tujuan program sudah sesuai dengan PTO PNPM-MP yakni untuk melembagakan kaum perempuan serta pendanaan usaha skala mikro dan terciptanya lapangan pekerjaan pedesaan. Sedangkan kebutuhan masyarakat peminjam dana SPP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dirumuskan setiap tahun pada awal tahun, dan terus di pantau setiap 3 bulan sekali sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Peluang yang ingin dicapai dalam program SPP adalah berkurangnya jumlah RTM di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Kedua adalah Evaluasi *Input* (Masukan), pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh mencakup semua elemen, yaitu pihak pelaksana program adalah BUMADES Bersama Mandiri serta pengontrol adalah pemerintah desa dan sasaran dan pelaku kebijakan adalah masyarakat. Sedangkan sumber dana program SPP adalah dana BLM yang didapat dari APBN, APBD, swadaya masyarakat serta hasil CSR. Strategi program dalam mendorong keberhasilan tujuan program adalah pemberian pelatihan usaha, meskipun pelatihan yang diberikan tidak diimplementasikan oleh masyarakat.

Evaluasi *process* (Proses), pelaksanaan program SPP di desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk belum berhasil sesuai tujuan, hal ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh peminjam dari 15 kelompok peminjam hanya ada 2 kelompok yang benar-benar menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha, sedangkan kelompok lainnya menggunakan dana SPP untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Faktor pendukung program SPP sendiri adalah program ini berbasis pemberdayaan dan perkreditan rakyat sehingga dana yang digunakan terus bergulir sehingga program SPP dapat berlanjut. Dari segi pelaksana penghambat kebijakan berasal dari kurangnya personil BUMADES bersama Mandiri Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dan dari segi masyarakat penghambat pencapaian program berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat akan tujuan program dan penyimpangan penggunaan dana SPP.

Terakhir Evaluasi *Product* (Produk), produk dari pelaksanaan program SPP di Desa Sumberkepuh kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk sendiri untuk saat ini terciptanya Kelembagaan perempuan yaitu Koperasi perempuan dan PKK yang dulu pernah vakum dan terdapatnya dana sosial yang digunakan untuk membantu anak dari keluarga RTM untuk memfasilitasi dalam pendidikan, serta dana sosial untuk penyandang disabilitas. Untuk pengurangan RTM sendiri belum mampu tercapai karena adanya penyimpangan yang

dilakukan oleh peminjam. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program simpan pinjam perempuan (SPP) di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk belum mencapai target yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan Pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk belum berhasil secara keseluruhan. Setiap kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri, oleh karena itu diperlukan adanya saran untuk memperbaiki kualitas kebijakan atau program yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Sesuai hasil penelitian di lapangan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, penulis memberikan saran dari hasil identifikasi beberapa kelemahan. Berikut ini adalah saran untuk program SPP :

1. Dalam penyeleksian calon Peminjam, dilakukan adanya survey lapangan terhadap usaha yang diajukan untuk pinjaman dana SPP PNPM-MP. Agar tidak adanya usaha semu untuk pengajuan pinjaman.
2. Penambahan kemitraan kerja bersama dinas-dinas yang berkaitan dengan usaha masyarakat, seperti dinas pertanian dan lain-lain sehingga pelatihan yang diberikan sesuai dengan usaha-usaha masyarakat pedesaan.
3. Penambahan pegawai BUMADES bersama Mandiri sehingga pegawai yang ada sebanding dengan jumlah sasaran kebijakan yang diharapkan mampu meminimalisir kecurangan yang ada di masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Indah Prabawati, S.Sos. M.Si. sebagai dosen pembimbing penelitian ini. Terima kasih juga untuk Ibu Hj Weni Rosdiana S.Sos. M.AP. dan Bapak Muhammad Farid ma'ruf S.Sos. M.AP. sebagai dosen penguji penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Affidin dan Saebani, Bani Ahmad 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia/
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.

- Moleong, Lexy J, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta
- Prabawati dan Tauran. 2015. *Evaluasi Kebijakan*, Surabaya: Unesa University Press.
- Subarsono. 2010, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung:Alfabeta cv
- Widodo, Joko, 2013, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2008, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Presindo
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Indek Pembangunan Manusia Jawa Timur*. (www.jatim.bps.go.id, diakses pada 04 Februari 2017)
- Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. (www.Sumberkepuh.com), diakses pada 04 Februari 2017)

Sumber Peraturan :

- Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung Jawaban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Nganjuk.
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011

Sumber Jurnal :

- Sahputri.Bayu Tri. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2013*
- Lestari, Purwati. 2013. *Pengaruh Kredit SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP Terhadap Pendapatan Masyarakat*.

Sumber Online :

- Badan Pusat Statistik Nasional. 2016. *Indek Pembangunan Manusia Nasional*. (www.bps.go.id, diakses pada 04 Februari 2017)